

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus melakukan upaya membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dalam tiga tahun terakhir ini tak hanya infrastruktur, pembangunan sarana ini juga meliputi empat program prioritas seperti pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pembangunan embung dan sarana olah raga. Selama tiga tahun ini pengucuran dana desa, angka kemiskinan dan pengangguran di desa ternyata tidak berkurang secara signifikan. Di sisi lain terjadi, Sejak tahun 2015 sampai 2018 bertanggal 21/11/2018 Berdasarkan hasil pemantauan Indonesian Corruption Watch (ICW) "Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar," kata peneliti ICW Egi Primayogha (Ihsanuddin, 2018). Besarnya dana desa yang telah dikucurkan pemerintah dari tahun 2015 sebesar Rp. 20.776 Triliun melalui APBN 2015 untuk 74.093 desa dan tahun 2016 sebesar Rp. 46,982 Triliun melalui APBN 2016 untuk 74.754 ternyata tidak mampu mendorong kemakmuran desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 60 triliun yang akan disalurkan pada 74.754 Desa di seluruh Indonesia. Pemerintah sangat memperhatikan dalam pengawasan pengelolaan dana desa tahun 2016 Kementerian desa membentuk satgas dana desa, yang mengawasi dan melakukan monitoring terhadap

pengelolaan dana desa, dan Peran aktif Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa diklaim menurunkan penyalahgunaan dana desa. Persoalan ini juga disoroti oleh Menteri Desa yang menyebutkan masyarakat sudah mulai berani melaporkan berbagai tindakan mencurigakan di desanya. Catatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengemukakan pada 2016 lalu, sebelum Satgas bekerja, pemerintah hanya menerima 900 laporan saja dalam setahun. Tetapi memasuki 2017 setelah Satgas Dana Desa dibentuk 10 ribu laporan masuk ke Satgas Dana Desa. Meski tidak semuanya berupa penyalahgunaan dana desa, tetapi besarnya angka yang masuk ke Satgas Dana Desa menunjukkan partisipasi warga desa yang mengawasi dana desanya, meningkat sangat tajam (Adhityahadi, 2018).

Kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa (PP No 43 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10). BAB VIII bagian ke 1 dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa., pasal 71).

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu , peran serta pihak-pihak di luar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akuntabilitas

keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawarah Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertical antara kepala desa dengan masyarakat dan atasan kepala desa. Dokumen public tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa (Yuliansyah & Rusmianto, 2016).

Fransisca Winarni dan Pandhu Yuanjaya, (2016) melakukan penelitian tentang Implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa. Implementasi terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan kebijakan dengan adanya faktor komunikasi dengan baik, Dan tingkat kecukupan Sumberdaya yang dimiliki pemerintah desa Wukirsari, baik berupa sumberdaya dana maupun kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan kebijakan penggunaan dana desa. Inten Meutia dan Liliana (2017) melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik Analisis dengan proses deskripsi kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113/2014. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi tahap mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai pengawasan telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang mampu serta patuh terhadap aturan penyusunan sistem keuangan desa tersebut. Nurlinda (2018) Melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

yang di lakukan di desa Nagori Lestari Indah Kec Siantar Kab. Simalungun. dalam pengelolaan keuangan desa sudah baik dimana kelengkapan dokumen telah sesuai dengan prosedur, penempatan Tingkat Nagori yang sesuai dengan tupoksinya, Maujana Nagori yang telah melaksanakan proses pengawasan dan evaluasi pada proses perencanaan. Hasil yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah baik juga akan berhubungan dengan akuntabilitas jika akuntabilitas ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Dengan demikian akuntabilitas pada Nagori Lestari Indah sudah cukup baik.

Terjadi banyaknya kasus pelanggaran dan penyelewengan Dana Desa oleh kepala desa di berbagai daerah di Indonesia misalnya di kabupaten pamekasan sendiri yang melibatkan Lima tersangka dalam kasus suap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan terkait penanganan perkara penyalahgunaan dana desa hari ini diperiksa KPK. Nama-nama tersangka melibatkan mantan bupati pamekasan dan kepala desa dassok, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indraprasetya, Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, dan Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Salehhoeddin (Umbari Prihatin, 2017). menjadi landasan dalam penelitian ini dalam menganalisis implementasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk meningkatkan pembangunan desa di desa lesong daja kec batu marmar kabupaten pamekasan dan ingin menggali lebih dalam factor-faktor tidak berkembangnya potensi desa dari segi pertanian dan pariwisata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk meningkatkan pembangunan desa. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Lesong Daja, Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. dengan berlandaskan pada Permendagri No. 113 tahun 2014, Peneliti ingin menganalisa sejauh mana implementasi dari pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya terdapat penganggaran pendapatan dan belanja desa apakah sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 di Desa Lesong Daja, Kec Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan tahun 2018?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pengelolaan APBDesa untuk meningkatkan pembangunan desa berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 di Desa lesong daja Kecamatan batur Marmar Kabupaten Pamekasan tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi pengelolaan APBDesa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 yang ada di Desa Lesong Daja, Kec Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan tahun 2018.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pengelolaan APBDesa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 di Desa Lesong Daja Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan tahun tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk dipergunakan sebagai upaya memberikan dan mengembangkan pemikiran untuk pembangunan desa dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas kepala desa sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa.
- b. Diharapkan agar dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan sumber informasi dalam penelitian selanjutnya atau pihak yang berminat untuk mengadakan studi yang lebih luas dan mendalam mengenai studi kasus implementasi pengelolaan APBDesa untuk pembangunan desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan dampak pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sebagai bahan pertimbangan permasalahan yang terjadi di desa, terutama di dalam pembangunan desa yang melibatkan peran aktif masyarakat dan pengambilan keputusan yang di ambil oleh kepala desa dalam kebijakan yang berdampak pada pembangunan desa.